



Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian daerah di provinsi Kalimantan Tengah

Section:
Human resources
management

Atsari Sujud^{1*} & Muhammad Ivan²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

²Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Abstract

On a regional scale, Central Kalimantan, which has human capital that dominates the labor market in both the formal and informal sectors, is faced with low skills to face the digitalized job market, including the tourism industry and MSMEs. With a touch of the creative economy, the market could be more active due to the inability to package tourism products. The upstream human capital, namely high school/vocational high school/equivalent graduates, needs to prepare in a planned way to face the job market. Governance factors are becoming increasingly important, along with the vision of regional heads, local government organizations (OPD), and private companies through CSR. Moreover, digital business start-ups need to be considered by corporate to build human resource development management for SMK graduates that are integrated with the business and industrial world (DUDI).

Received: 04 Jan 2022
Revised: 05 Jun 2022
Accepted: 23 Jun 2022
Online: 30 Jun 2022

JRMB
Jurnal Riset Manajemen
dan Bisnis

Vol. 7, No.1, 2022
pp. 49-56

Keywords:

HR development management, vocational high school graduates, tourism industry, MSMEs

Corresponding author

Atsari Sujud, Universitas Nasional
Email: atsari.sujud@gmail.com

© The Author(s) 2022

DOI: <https://doi.org/10.36407/jrmb.v7i1.343>



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Sejak pandemi Covid-19 mewabah di seluruh penjuru dunia menjadi faktor yang sangat berdampak pada surutnya industri pariwisata setahun belakangan ini. Idealnya, peningkatan pariwisata akan memfasilitasi pengembangan sektor lain termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian melalui keterkaitan lintas sektor; Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan. Promosi diseminasi teknologi dan penelitian dan pengembangan. Salah satu faktor utama selain pendanaan untuk membangun ulang ekosistem industri pariwisata membutuhkan human capital (modal manusia) yang kuat di dalamnya. Tatkala pandemi atau bencana lain terjadi, peran human capital akan sangat berdampak bagi keberlangsungan industri pariwisata. Kelangsungan hidup setiap tujuan wisata didasarkan pada penyediaan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk organisasi dan perusahaan pariwisata. Sebagai komponen penting dari keberlanjutan bisnis, kualitas layanan diciptakan oleh orang-orang yang merancang, mengelola, dan memberikan layanan ini. Artinya, kualitas penyampaian layanan di suatu destinasi merupakan cerminan kualitas human capital-nya (Esu, 2012).

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki komoditas besi dan emas. Pertambangan emas di provinsi ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia dan menyimpan 45 juta ton emas. Meskipun demikian, komoditas alam ini seiring waktu akan terus berkurang. Oleh karena itu, *human capital* perlu diciptakan untuk membangun ekosistem pembangunan *human capital* yang kreatif dan inovatif. Faktor *human capital* menjadi persoalan utama keberhasilan industri pariwisata di berbagai negara dan berbagai destinasi regional di negara tersebut. Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi yang berada dalam wilayah Indonesia memiliki potensi alam dan nilai budaya yang berbeda dari daerah lainnya. Untuk menghasilkan kualitas industri pariwisata yang mumpuni, kualitas tidak dapat ditambahkan di akhir suatu proses, tetapi harus dibangun ke dalam layanan dari awal hingga akhir, melalui berbagai tahapan dan langkah, termasuk human capital yang berasal dari lulusan pendidikan formal dan vokasi. Ketersediaan human capital ini bukan hasil dari pelatihan singkat, namun ada kebanggaan menjadi bagian dari ekosistem industri pariwisata.

Studi ini secara khusus membahas mengenai potensi dan permasalahan dalam pengembangan SDM di Kalimantan Tengah. Beberapa studi sebelumnya (Anggreni & Suartini, 2019; Irmayani & Sudirman, 2019; Rahmawati, 2018) telah focus pada pembahasan mengenai pengembangan SDM daerah, namun dilakukan pada provinsi yang berbeda. Studi ini dapat menambah informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan strategi pengembangan SDM mulai dari pendidikan menengah di daerah masing-masing.

DESKRIPSI KASUS

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi beberapa kali perubahan, terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggarannya sendiri. Pemberian otonomi daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan sendiri rencana dan strategi keuangan yang dapat mempengaruhi kemajuan daerah. Pembangunan itu sendiri merupakan proses multifaset yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, pendidikan, sikap dan kelembagaan nasional, termasuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan absolut dan mengentaskan kemiskinan (Khan et al., 2015).

Peraturan pendukung

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Perda yang mengamanatkan 16 industri kreatif yang perlu dikembangkan: 1) Periklanan, 2) Arsitektur, 3) Kerajinan Tangan, 4) Kerajinan Tangan, 5) Desain dan 6) Fashion. 7) Video, Film dan Fotografi, 8) Permainan Interaktif, 9) Musik, 10) Seni Pertunjukan, 11) Penerbitan dan Percetakan, 12) Jasa Komputer dan Perangkat Lunak, 13) Televisi dan Radio, 14) Penelitian dan Pengembangan, 15) 16) rumput (Sumarno, 2012). Industri kreatif mendorong UKM untuk memasuki teknologi digital terutama dalam hal pemasaran produk, termasuk menyediakan sumber daya manusia yang potensial di industri pariwisata. Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan pariwisata, yang sebagian besar disebabkan oleh letak geografis dan fitur alamnya. Potensi wisata yang ada dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Potensi daerah

Destinasi wisata di Kalimantan Tengah terbagi menjadi 14 wilayah/kota administratif, salah satu destinasi wisata mancanegara yang paling terkenal adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaring Barat dan Kabupaten Seruyan yang dilindungi oleh vegetasi dan cagar alam, termasuk Satwa liar, terutama orangutan. Selain itu, beberapa tempat wisata seperti Pantai Ujung Pandaran, Arboretum Reintroduksi Orangutan, Taman Wisata Tangkiling, dan wisata budaya seperti Rumah Betang dan Museum mulai dikembangkan untuk pengelolaan yang lebih baik. Belum lagi potensi kuliner yang sangat potensial untuk dieksplorasi lebih jauh lagi. Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar kedua setelah Papua yang didominasi oleh suku Dayak, Jawa dan juga Banjar. Kalimantan Tengah tidak hanya memiliki potensi alam yang indah untuk dimanfaatkan sebagai tujuan wisata, tetapi juga potensi wisata kuliner yang bisa dibawa ke seluruh dunia. Berikut beberapa daftar masakan khas Kalimantan Tengah: Juhu Umbut Sawit, Kalumpe/Kaluang, Wadi, Juhu Taya, Juhu Umbut Rotan, Keripik Kelakai, Lemang, Kue Gagatas dan masih banyak lagi sajian atau variasi kuliner daerah Kalimantan Tengah lainnya yang dilestarikan dan masih menjadi makanan sehari-hari (Septo et al., 2021).

Kalimantan Tengah sebenarnya merupakan daerah yang memiliki potensi untuk memaksimalkan industri kreatif dengan kearifan lokalnya, namun pada praktiknya Kalimantan Tengah belum secara optimal mereplikasi karakteristik daerahnya di tingkat nasional, khususnya pada industri pangan. Industri kuliner Kalimantan Tengah merupakan salah satu industri yang menunjukkan keragaman yang dapat dibudidayakan lebih lanjut dan ditampilkan di luar Kalimantan Tengah. Produk-produk yang dihasilkan industri kreatif Kalimantan Tengah biasanya bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat khususnya masyarakat Dayak yang tinggal di provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya ibu kota provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki berbagai kuliner khas daerah yang sangat unik dan lezat seperti Juhu Rotan, Juhu Asem, Oseng Kalakai (Pakis), Kandas, Ikan Bakar, Wadi, daun singkong parut, terong Bapapui, dan lainnya (Alexandro et al., 2020).

Tata kelola industri pariwisata dan UMKM yang mendukung membutuhkan human capital dari generasi post-milenial yang akan mendominasi populasi penduduk. Lulusan SMK sangat potensial mengisi kekurangan sumber daya manusia yang dapat menunjang keberlangsungan perekonomian daerah, terkhusus industri pariwisata dan UMM di Kalimantan Tengah.

METODE

Metode penelitian ini adalah *literature review* dengan menggunakan referensi dari jurnal, buku, riset, dan peraturan perundang-undangan. Pencarian literature sebagian besar dilakukan secara online melalui pencarian google dan situs database jurnal. Pencarian literatur menggunakan kata kunci manajemen pendidikan dan pelatihan vokasi, lulusan SMK, industri pariwisata, dan UMKM.

HASIL DAN EVALUASI

Potensi SDM di Kalimantan Tengah

Dalam RPJMN 2015-2019 bahwa Kalimantan Tengah Sebagai salah satu provinsi dengan lapangan kerja tertinggi dari segi angkatan kerja, dapat terjadi peningkatan demografis, yaitu keadaan dimana penduduk produktif (15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan dasar untuk meningkatkan produktivitas dan memulai pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan sumber daya manusia. Ketika angka kelahiran turun, peningkatan pendapatan per kapita yang memenuhi kebutuhan dasar penduduk anak dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas manusia sebagai modal pembangunan. Pada saat yang sama, jumlah anak yang sedikit memberikan peluang bagi perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja. Bonus demografi menjadi jendela peluang bila didukung oleh sumber daya manusia yang terampil. Negara-negara Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea mendapat manfaat dari peningkatan demografi ini antara tahun 1960 dan 1990 (Bloom et al. 1999; Bloom dan Finlay 2009), yang ditandai dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat. dari populasi di negara-negara tersebut.

Menurut data tahun 2015, isu terkait ketenagakerjaan masih penting dan memerlukan pemantauan yang komprehensif dan terarah. Masalah ketenagakerjaan utama yang masih dihadapi Kalimantan Selatan adalah pengangguran, antara lain karena (1) ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang terhambat oleh pertumbuhan ekonomi, (3) buruknya kualitas tenaga kerja, (4) kekurangan pasokan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dan (5) motivasi dan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Pada Agustus 2014, jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1.193.171 orang dan tingkat penyerapan tenaga kerja (TPAK) sebesar 68,56 persen. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1.154.489 orang dan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 96,76 persen. Menyadari potensi sumber daya manusia yang menjadi pegawai di Provinsi Kalimantan Tengah masih jauh dari harapan pemerintah daerah. Namun demikian, tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan hasil yang positif, dimana tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,54 persen pada tahun 2015 dan 3,67 persen pada bulan Februari 2016. Besarnya angka pengangguran ini harus menggarisbawahi kualitas sumber daya manusia yang akan berwiraswasta, yang akan berusaha mendapatkan bantuan dari buruh dan buruh kasar/pegawai yang daya saingnya masih lemah.

Pengangguran bisa bersifat sementara, terutama bagi lulusan universitas yang membutuhkan waktu sebelum mencari pekerjaan. Terdapat pula kecenderungan terjadinya pengangguran di kalangan angkatan kerja terdidik, terutama mereka yang berpendidikan SLTA atau SL, yang di satu sisi disebabkan oleh ketidaksesuaian antara isi pendidikan dengan pekerjaan yang diinginkan, serta keterampilan dan keterampilan. Tipe. Persyaratan belum lagi potensi peningkatan pengangguran di kalangan anak muda usia 15-19 tahun. Dengan kondisi demikian, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan untuk mengelola perubahan teknologi melalui

pendidikan baik formal maupun nonformal. Tata kelola sistem pendidikan, pelatihan, dan rekrutmen melalui teknologi digital akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi lulusan SMA/SMK/ sederajat di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan melibatkan pendidikan formal seperti SMA/SMK/ sederajat dan pendidikan non formal seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang berada di bawah Kemendikbud/Disdik dan Lembaga Pelatihan Kerja yang berada di bawah Kemenaker/Dinaker, maka pendidikan non formal berperan menjadi alternatif kursus dan pelatihan yang dapat menekan angka pengangguran.

Coombs dalam Sutaryat (2005:15) mendefinisikan nonformal education sebagai setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar system persekolahan yang mapan baik dilakukan secara terpisah atau sebagai bagian penting dari kegiatan yang lebih besar, dilakukan secara sengaja untuk melayani peserta didik tertentu guna mencapai tujuan belajarnya. Dengan tata kelola lulusan SMA/SMK/ sederajat melalui teknologi digital, lulusan SMA/SMK tidak perlu lagi membuat lamaran kerja, karena dengan memanfaatkan teknologi digital, siswa sejak kelas I SMA/SMK/ sederajat sudah dipersiapkan untuk mengisi portfolio. Persoalannya kemudian, pemerintah daerah perlu memetakan kursus dan pelatihan yang sudah *existing* maupun kursus dan pelatihan yang dilaksanakan hanya ketika ada bantuan dana.

Dalam tahapan penyusunan RPJMD Kalimantan Tengah terdapat 8 isu strategis yang membutuhkan kualitas SDM untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan, yakni: (1) memajukan Penyelesaian Masalah Kehutanan dalam RTRWP Kalimantan Tengah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pengelolaan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan, Hutan dan Kebun; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja yang berdaya saing; (3) pengembangan ekonomi hijau dan manajemen hijau dalam pelaksanaan pembangunan daerah; (4) pembagian barang umum yang merata; (5) restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan; (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah; (7) memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan mengoptimalkan investasi; dan (8) pelaksanaan tata kelola yang baik secara umum.

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah tidak secara holistik dan komprehensif memuat jumlah kursus dan pelatihan. Sebagaimana gambar di bawah ini menandakan bahwa Bappeda belum secara terencana memanfaatkan fungsi dan peran pendidikan non formal untuk mengakomodir lulusan SMA/SMK/ sederajat yang membutuhkan kursus dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas skill. Berdasarkan Laporan Perekonomian Kalimantan Tengah (2020), prospek perekonomian daerah diperkirakan akan didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi pada triwulan I tahun 2020 seiring dengan persiapan masyarakat menghadapi peningkatan aktivitas di tengah pandemi COVID-19. . Sementara itu, tekanan inflasi diperkirakan meningkat seiring dengan membaiknya pendapatan masyarakat.

Penetrasi ekonomi digital UMKM dan dampaknya bagi keuangan daerah

Sesuai dengan arahan Presiden tentang pentingnya memanfaatkan momentum pandemi untuk mempercepat digitalisasi UKM di industri pangan, maka perlu dirumuskan tantangan dan tujuan pembangunan ketahanan pangan yang terintegrasi antara program pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Pengembangan UKM di bidang pangan. Setelah itu, dilaksanakan program kerja pengendalian inflasi tahun 2022-2024 yang menjadi acuan wajar dalam pengendalian inflasi daerah untuk menjamin ketersediaan penawaran dan kelancaran distribusi. Beberapa pemangku kepentingan OPD dan daerah antara lain BAPPEDA, Dishub, Dinas Keamanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPS, Dinas Pangan dan Peternakan Hortikultura, BULOG, termasuk Bank Indonesia menghadiri kick-off meeting untuk menyusun rencana pengendalian inflasi daerah. (BI, 2022).

Provinsi Kalimantan Tengah saat ini memiliki 3.410 unit koperasi dengan jumlah anggota 433.968 orang, mengalami peningkatan dari 3.328 unit koperasi pada tahun 2020. Pentingnya keberadaan koperasi adalah sebagai badan usaha yang dapat menaungi para pelaku UMKM. Keduanya saling berkaitan menjadi daya ungkit perekonomian. Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran juga mengatakan bahwa UMKM dan koperasi merupakan bagian dari ketahanan ekonomi yang mendasar. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan produk UMKM harus menembus pasar ekspor dan harus bisa menciptakan SDM yang handal. (Republika, 2021). Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah secara keseluruhan pada triwulan IV 2021 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Baru-baru ini, di bawah Presidensi Jerman G20, diskusi kebijakan tingkat tinggi berfokus pada peran keterampilan digital dan inklusi digital dalam mempromosikan partisipasi kerja dan sosial (IMF, 2017; Kirton & Warren, 2018). Di bawah Presidensi Argentina, ada dimasukkannya "Pendidikan" sebagai salah satu bidang strategis utama, serta pembentukan Satuan Tugas T20 tentang Masa Depan Pekerjaan dan Pendidikan untuk Era Digital. Pekerjaan yang dilakukan tahun lalu oleh Gugus Tugas menyoroti saling ketergantungan yang kuat antara transformasi berbasis teknologi dan peran penting yang perlu dimainkan oleh pendidikan formal, informal dan non-formal dalam mempersiapkan siswa dan pengusaha untuk pasar tenaga kerja yang dinamis dan terus berubah. Keuntungan dari semua upaya ini dapat dilipatgandakan kebijakan yang menargetkan populasi rentan.

Sebagai langkah selanjutnya, G20 harus fokus pada mengatasi kesenjangan keterampilan digital dan tantangan yang dihadapi populasi yang rentan, serta hubungannya dengan masa depan pekerjaan. Laporan dari T20 Japan tahun 2019 tersebut menandakan pentingnya integrasi antara keterampilan digital dan bagaimana mempersiapkan SDM untuk menjadi bagian dari masa depan pekerjaan tersebut. Beberapa sekolah tidak menyediakan pelatihan digital, dan jika pelatihan tersedia, itu mungkin tidak wajib (Chetty et al, 2017). Selain itu, hambatan bahasa tetap menjadi tantangan yang relevan, mengingat sebagian besar konten digital dalam bahasa Inggris, termasuk pemrograman dan pengkodean (Internet World Stats, 2018). Dalam konteks ini tantangan muncul bukan hanya pada kualitas lulusan yang sudah siap bekerja, melainkan dimana mereka akan bekerja atau pekerjaan yang tersedia.

Jika Indonesia menerapkan digitalisasi, Indonesia dapat merealisasikan pertumbuhan sekitar USD 150 miliar — 10 persen dari PDB — pada tahun 2025. Teknologi digital menawarkan cara untuk meningkatkan produktivitas lintas sektor dan memperluas partisipasi dalam perekonomian ke semua segmen populasi (McKinsey, 2016). Namun hasil telaah McKinsey tersebut menyarankan Indonesia untuk mempercepat kemajuan digital Indonesia yang membutuhkan bisnis yang penuh tantangan dan mengubah bisnis secara fundamental. Untuk menang di era digital, bisnis Indonesia harus mengejar lima keharusan strategis yang akan memelopori pertumbuhan dan efisiensi: (1) tentukan pengalaman customer-centric untuk membedakan pada desain dan kelincahan; (2) mengembangkan keterlibatan omnichannel untuk menghubungkan dunia online dan offline; (3) manfaatkan data besar untuk mendorong keputusan real-time di seluruh rantai nilai; (4) gandakan keamanan siber untuk melindungi modal informasi di dunia yang terhubung; (5) membangun kemampuan digital untuk mengembangkan organisasi era digital.

Dalam kaitan dengan employability (keberkerjaan) di Provinsi Kalimantan Tengah bahwa layanan informasi dan komunikasi belum dioptimalkan untuk hal-hal yang produktif. Lulusan siswa SMA/SMK/ sederajat belum secara sistematis dikelola (upgrade teknologi digital) dan diarahkan (disalurkan) untuk mengenal tren dan jenis pekerjaan yang akan eksis kini dan masa depan. Jika dikaitkan dengan IPM dan data pengangguran di Kalimantan Tengah didominasi oleh

penduduk yang memiliki pendidikan tertinggi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase 7,19 persen di Agustus 2019. Tantangan ini sebenarnya dapat diantisipasi dengan mempersiapkan sistem pendidikan, pelatihan, dan rekrutmen sehingga lulusan tersebut tidak lagi perlu membuat surat lamaran pekerjaan yang tidak efisien (dana untuk membuat lamaran pekerjaan dan pengiriman surat serta transportasi) dan tidak efektif (lama dalam menilai profil tenaga kerja). Dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang baik, maka setiap lulusan akan memiliki kompetensi yang sama baiknya, sementara tanpa didukung sistem rekrutmen yang baik, maka segala kompetensi tersebut seperti tiada gunanya, karena tidak ada sistem penyaluran yang langsung terkoneksi dengan industri pariwisata yang dapat menampung banyak tenaga kerja dan kemitraan sekolah dengan UMKM yang ada di Kalimantan Tengah.

SIMPULAN

Manajemen pengembangan SDM yang terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) memiliki peran dalam peningkatan skill bagi siswa SMA/SMK/ sederajat. Keterbatasan dan ketimpangan kualitas mutu pendidikan dan sarana prasarana memicu lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk mengakomodir keterampilan yang dapat menjadi bekal berharga bagi siswa/warga belajar. Siapapun dapat menjadi bagian dari LKP maupun LPK, terutama mereka yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/ sederajat maupun lulusan SMA/SMK/ sederajat yang perlu menambah dan melengkapi keterampilan yang relevan kini dan masa depan. Permasalahan tata kelola LKP dan LPK menjadi tantangan klasik yang belum mendapat stimulus model seperti apa yang dapat menyatukan seluruh LKP dan LPK sehingga mampu mengakomodir lulusan SMA/SMK/ sederajat yang masih belum bekerja.

REFERENSI

- Alexandro, R., Uda, T., & Pane, L. L. (2020). Analisis Pengembangan Ekonomi Kreatif Kuliner Khas Suku Dayak Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24749>
- Anggreni, P., & Suartini, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di 3 Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Persaingan Global (Studi pada Universitas di Provinsi Bali). *ISEI Business and Management Review*, 3(1), 25–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.36217/ibmr.v3i1.83>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2020). Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2020.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah
- Chetty, K., Aneja, U., Mishra, V., Gcora, N., & Josie, J. (2017). Bridging the digital divide in the G20: Skills for the new age. *Economics Discussion Papers*, No. 2017-68. Berlin, Germany: Kiel Institute for the World Economy. Retrieved from: <http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2017-68/file>
- Esu, B. B. (2012). Linking human capital management with tourism development and management for economic survival: The Nigeria experience. *International Journal of Business and Social Science*, 3(11).
- Irmayani, I., & Sudirman, A. M. (2019). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Microsoft Office Pada Aparat Desa di Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. *Abdimas Toddopuli: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 20–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.30605/atjpm.v1i1.96>
- Khan, M. T., Humayun, A. A., & Sajjad, M. (2015). Connotation of human capital: Concept, effects

and benefits (review). *International Journal of Information, Business and Management*, 7(1), 19–35. <http://ijibm.elitehall.com/>

Rahmawati, A. (2018). Efektivitas Program Penyelenggaraan Diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(2). <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.791>

Septo, S., Wulandari, L. A., Tiwo, C. Y., Yanti, E., Karliani, E., & Tryani, T. (2021). Eksplorasi Kekayaan Kuliner Masyarakat Suku Dayak Ngaju Di Desa Mandomai Kalimantan Tengah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 386–396. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1729>

Declarations

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

How to cite this Article

Sujud, A., & Ivan, M. (2022). Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian daerah di provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 49 - 56. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v7i1.343>